
Evaluasi Infrastruktur Pariwisata Pantai Anyer: Analisis Aksesibilitas, Fasilitas Umum, dan Partisipasi Masyarakat

Nabila Safitri¹, Annisa Sekar Lestari², Ardi Wijaya Putra³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: nabilaasftrii@gmail.com, annisasekarlestari@gmail.com, wardi5857@gmail.com

Article History:

Received: 08 Desember 2025

Revised: 20 Januari 2026

Accepted: 24 Februari 2026

Keywords: *Pantai Anyer, wisata berkelanjutan, pengelolaan kolaboratif, infrastruktur, keterlibatan masyarakat*

Abstract: *Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur pariwisata di Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Latar belakang penelitian ini adalah ketidakseimbangan antara bertambahnya jumlah wisatawan dan kualitas infrastruktur publik yang masih kurang, terutama dalam hal kebersihan, sarana umum, dan keterlibatan masyarakat lokal. Studi ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung oleh data kuantitatif. Data awal didapatkan lewat wawancara mendalam bersama pejabat Dinas Pariwisata, komunitas lokal, dan pelaku usaha, serta melalui pengamatan di lapangan. Data sekunder diambil dari dokumen resmi pemerintah, laporan Badan Pusat Statistik, publikasi ilmiah, dan berita media online. Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan promosi pariwisata, namun kurang memberikan perhatian pada pemeliharaan sarana publik. Sektor swasta menguasai investasi pada hotel dan resor, tetapi partisipasinya dalam tanggung jawab sosial perusahaan masih minim. Masyarakat setempat terlibat melalui usaha kecil dan layanan pariwisata, namun partisipasi mereka masih terbatas akibat kurangnya modal dan pelatihan yang minim. Analisis dengan memanfaatkan teori sistem David Easton, pengelolaan kolaboratif, serta konsep pariwisata berkelanjutan menunjukkan bahwa keterbatasan utama terdapat pada minimnya kolaborasi antaraktor. Penelitian ini menyatakan bahwa keberlanjutan pariwisata Pantai Anyer hanya bisa terwujud melalui kerjasama setara antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang mengharmoniskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata adalah salah satu elemen krusial yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi pada Produk Domestik Bruto, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan serta mendorong aktivitas ekonomi lokal. Setelah pandemi COVID-19 mereda, sektor pariwisata kembali dianggap sebagai salah satu penggerak pemulihan ekonomi, baik secara nasional maupun regional.

Provinsi Banten terletak secara strategis di pesisir barat Pulau Jawa dan menjadikan sektor wisata sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Di antara berbagai tempat wisata, Pantai Anyer menjadi simbol utama yang telah lama terkenal, khususnya di kalangan pengunjung dari daerah Jabodetabek. Jarak yang tidak jauh dari Jakarta dan pemandangan laut yang menawan menjadikan Anyer sebagai pilihan liburan singkat yang diminati. Keadaan ini mendorong perkembangan sektor perhotelan, kuliner, dan bisnis kecil di sekitar area pantai.

Namun, potensi besar itu tidak sebanding dengan kualitas infrastruktur pariwisata, terutama sarana publik. Akses jalan ke area Anyer semakin membaik, salah satunya dengan hadirnya Jalan Lingkar Selatan yang mempercepat durasi perjalanan. Namun, keadaan fasilitas publik seperti toilet umum, pengaturan area parkir, dan manajemen sampah masih belum memenuhi standar kenyamanan. Sampah merupakan masalah klasik yang terus muncul, terutama ketika musim liburan tiba. Di samping itu, ada keluhan mengenai ketidakjelasan biaya parkir, penataan tempat makan yang berantakan, dan kurangnya ruang publik yang nyaman untuk pengunjung. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur pariwisata di Anyer belum dilaksanakan secara menyeluruh. Pemerintah daerah biasanya lebih menekankan proyek infrastruktur, namun belum cukup efektif dalam Pengawasan dan pengelolaan layanan publik sehari-hari. Sektor swasta terlibat dalam pembangunan hotel dan resor, tetapi kontribusinya minim dalam hal pelayanan publik seperti kebersihan dan kenyamanan umum. Sebaliknya, masyarakat setempat sesungguhnya memiliki peluang besar untuk terlibat melalui bisnis akomodasi, makanan, dan layanan pariwisata, tetapi terhambat oleh keterbatasan modal, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya dukungan kebijakan.

Ketidakharmonisan ini berpengaruh terhadap rendahnya kualitas pariwisata. Secara kuantitatif, Pantai Anyer memang mengalami peningkatan jumlah pengunjung, namun secara kualitatif berisiko tertinggal dibandingkan destinasi lain yang dikelola dengan lebih baik. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis secara mendalam kontribusi masing-masing pihak dalam pengembangan infrastruktur pariwisata di Pantai Anyer. Infrastruktur tidak hanya berarti jalan dan struktur fisik, melainkan juga mencakup pengelolaan, kebersihan, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengkaji interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur di Pantai Anyer, serta seberapa jauh kolaborasi tersebut mendukung atau malah menghalangi terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Teori Sistem Menurut David Easton

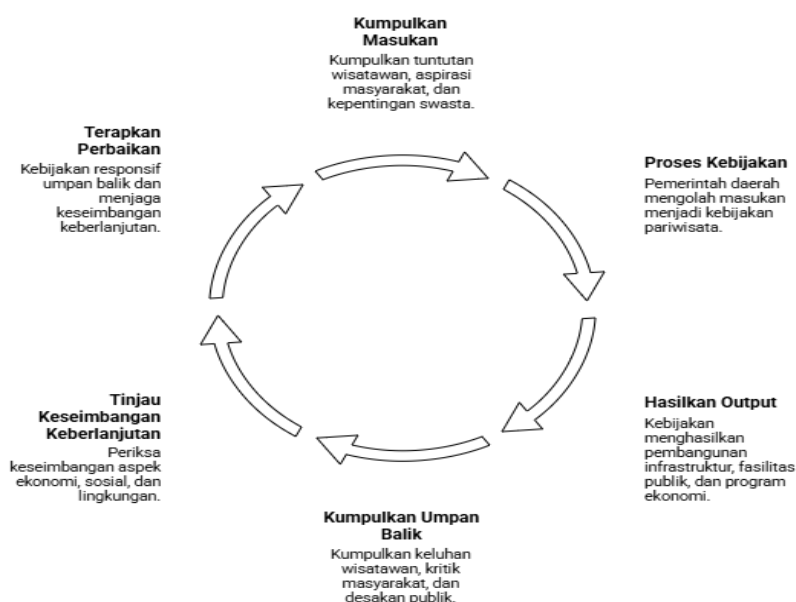
David Easton melihat sistem politik sebagai sebuah mekanisme yang terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik. Dalam kerangka kebijakan publik, masukan berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat; proses adalah tahap pengolahan masukan menjadi kebijakan; keluaran berupa kebijakan, program, atau proyek; sementara umpan balik merupakan respons masyarakat terhadap kebijakan yang akan menjadi masukan pada siklus selanjutnya.

Dalam konteks Pantai Anyer, masukan bisa berupa keinginan wisatawan untuk menikmati

kebersihan pantai, harapan masyarakat setempat untuk mendapatkan kesempatan ekonomi, dan kebutuhan pihak swasta akan jaminan investasi. Proses terlihat dalam cara pemerintah daerah merancang kebijakan dan program untuk pembangunan infrastruktur. Hasilnya dapat mencakup pembangunan Jalan Lingkar Selatan, penyediaan sarana umum, atau inisiatif pemberdayaan komunitas. Umpan balik muncul sebagai keluhan wisatawan tentang limbah, kritik masyarakat terkait rendahnya keterlibatan, dan tekanan publik atas kurangnya pengawasan.

Teori sistem mengindikasikan bahwa permasalahan pariwisata di Pantai Anyer bukan hanya disebabkan oleh minimnya sarana, tetapi juga oleh rendahnya efektivitas mekanisme umpan balik. Harapan wisatawan dan masyarakat setempat tidak sepenuhnya terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan cenderung bersifat atas ke bawah dan kurang responsi.

Siklus Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan



**Gambar 1. Contoh Diagram
Model Sistem Politik David Easton**

Diagram ini menggambarkan alur dasar dalam model sistem politik David Easton, yang terdiri dari input (tuntutan dan dukungan), proses konversi, output (kebijakan publik), serta umpan balik dari masyarakat yang kemudian kembali menjadi input bagi sistem politik. Siklus ini menunjukkan bagaimana sistem politik bekerja secara berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena masalah yang diteliti tidak hanya melibatkan aspek teknis infrastruktur, tetapi juga mencakup dinamika sosial, politik, dan ekonomi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi dari para aktor yang terlibat.

Studi dilakukan di area Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi ditentukan oleh posisi Anyer sebagai tujuan wisata unggulan di Banten yang memberikan kontribusi ekonomi yang besar, namun menghadapi tantangan serius terkait kebersihan, kualitas

infrastruktur publik, dan keterlibatan masyarakat. Periode penelitian berlangsung dari bulan September hingga Desember 2025.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pariwisata, penduduk setempat, dan pelaku swasta seperti pengelola hotel, resort, restoran, serta pedagang kecil. Sumber informasi dari warga setempat meliputi pemilik usaha mikro dan remaja lokal yang terlibat dalam aktivitas di area pantai. Observasi langsung dilakukan untuk menilai keadaan fasilitas umum di area pantai, seperti toilet umum, tempat parkir, ruang terbuka, serta kebersihan pada hari biasa dan akhir pekan.

Data sekunder didapatkan dari dokumen resmi pemerintah, laporan Kementerian Pariwisata, statistik Badan Pusat Statistik, berita media online, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik pengelolaan pariwisata dan keterlibatan masyarakat. Data ini dimanfaatkan untuk menguatkan dan mengonfirmasi hasil yang diperoleh di lapangan.

Metode pengumpulan data mencakup wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif yang terbatas, serta analisis dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kebijakan, pengalaman aktor, dan opini mereka tentang pengelolaan pariwisata. Pengamatan membantu peneliti mengetahui keadaan nyata infrastruktur dan tingkah laku pengguna di area pantai. Dokumentasi dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang data kunjungan wisatawan, distribusi anggaran, dan kebijakan resmi.

Validitas data dipertahankan melalui triangulasi sumber dan metode. Data dari pejabat pemerintah dibandingkan dengan pandangan masyarakat dan swasta, dan kemudian dikonfirmasi melalui observasi lapangan serta data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema utama, yaitu peran pemerintah, peran sektor swasta, peran masyarakat, dan pola kolaborasi antaraktor. Kerangka teori sistem, tata kelola kolaboratif, dan pariwisata berkelanjutan digunakan sebagai lensa analitis untuk menginterpretasi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Infrastruktur

Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Banten memiliki peranan krusial dalam pembangunan infrastruktur pariwisata di Pantai Anyer. Salah satu pencapaian yang kerap disoroti adalah pembangunan Jalan Lingkar Selatan yang meningkatkan akses ke area pantai. Peningkatan aksesibilitas ini berdampak pada bertambahnya jumlah wisatawan serta arus lalu lintas kendaraan ke Anyer.

Akan tetapi, pembangunan akses jalan tidak disertai dengan peningkatan pengelolaan fasilitas umum di area pantai. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa banyak toilet umum berada dalam kondisi yang tidak memadai, beberapa dalam keadaan rusak atau kotor, dan tidak terawat. Tempat parkir dikelola tanpa adanya sistem yang teratur, sehingga mengakibatkan keluhan dari pengunjung mengenai biaya dan tata letak kendaraan. Manajemen sampah juga belum berjalan dengan baik. Tumpukan sampah muncul di berbagai lokasi, terutama saat periode libur panjang ketika jumlah pengunjung meningkat.

Dari segi anggaran, bagian belanja pariwisata dalam APBD tergolong kecil dan lebih banyak diperuntukkan untuk promosi serta pembangunan fisik, sedangkan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat mendapatkan alokasi yang tidak mencukupi. Wawancara dengan penduduk lokal menunjukkan ketidakpuasan karena pemerintah dianggap lebih mengutamakan proyek besar yang jelas terlihat namun tidak mengatasi isu sehari-hari seperti kebersihan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Jika dianalisis dengan teori sistem, terlihat bahwa masukan dari masyarakat dan wisatawan berupa keluhan serta harapan tidak sepenuhnya diakomodasi dalam proses kebijakan. Mekanisme umpan balik tidak berfungsi dengan baik, sehingga hasil kebijakan cenderung tidak memenuhi kebutuhan utama. Ini menunjukkan bahwa siklus kebijakan tidak berjalan secara optimal.

Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pariwisata

Sektor swasta memiliki posisi utama dalam pengembangan industri pariwisata di Pantai Anyer. Pertumbuhan hotel, resor, dan restoran dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan keyakinan investor terhadap prospek ekonomi daerah ini. Keberadaan perusahaan swasta berperan dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Walaupun begitu, kontribusi sektor swasta dalam membantu pengelolaan infrastruktur publik dan perlindungan lingkungan masih belum maksimal. Sejumlah resor besar membatasi akses ke pantai dan mengurangi ruang gerak komunitas lokal serta pengunjung yang tidak menginap di lokasi tersebut. Program tanggung jawab sosial perusahaan sering kali bersifat simbolis dan belum terstruktur sebagai program jangka panjang, seperti pelatihan kewirausahaan, dukungan pendanaan untuk UMKM lokal, atau pengelolaan limbah secara kolaboratif.

Dalam konteks pengelolaan kolaboratif, situasi ini mengindikasikan terjadinya ketidakseimbangan. Swasta meraih manfaat ekonomi, namun tidak sepenuhnya terlibat dalam tanggung jawab bersama untuk mempertahankan kualitas destinasi. Ketidadaan forum diskusi dan kesepakatan kerja sama yang tegas antara pemerintah dan pelaku usaha mengakibatkan arah pembangunan pariwisata seringkali ditentukan oleh mekanisme pasar.

Kontribusi Komunitas Lokal Dalam Pariwisata

Masyarakat setempat berkontribusi melalui berbagai usaha seperti restoran, toko suvenir, penyewaan perahu, dan penginapan kecil. Upaya ini menjadi sumber kehidupan yang krusial dan mencerminkan hubungan langsung antara industri pariwisata dan perekonomian setempat. Namun, sumbangan ekonomi masyarakat terhadap total pendapatan sektor pariwisata di Anyer masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan usaha besar milik investor dari luar daerah.

Rintangan utama yang dihadapi oleh masyarakat adalah kurangnya modal, kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan, serta terbatasnya keterampilan manajerial dan layanan. Program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau sektor swasta masih minim, tidak teratur, dan tidak selalu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai akibatnya, daya tawar masyarakat di dalam ekosistem pariwisata tetap kurang kuat.

Dalam konteks sosial budaya, komunitas lokal menyimpan potensi besar melalui tradisi perikanan, masakan tradisional, dan cerita rakyat yang dapat diolah sebagai daya tarik untuk pariwisata. Akan tetapi, potensi ini belum terkolaborasi dalam perencanaan pariwisata yang resmi. Ruang partisipasi formal yang terbatas menyebabkan masyarakat seringkali hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang memiliki kekuatan.

Analisis yang didasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan menunjukkan bahwa elemen sosial belum menjadi fokus utama dalam pengelolaan Anyer. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, pariwisata kemungkinan besar hanya memberikan pertumbuhan ekonomi yang bersifat sementara dan berisiko menimbulkan ketegangan sosial.

Analisis Ketidakseimbangan Kerja Sama Antaraktor

Jika ketiga peran tersebut dianalisis secara bersamaan, terlihat jelas adanya ketidakmerataan

dalam pola kolaborasi. Pemerintah berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan promosi, sektor swasta terkemuka dalam investasi dan manajemen usaha, sedangkan masyarakat berada dalam posisi yang cukup lemah. *Lack of an effective collaboration platform, such as regular forums that bring together the three actors to plan and assess destination management, results in partial policy implementation.*

Dalam sudut pandang teori sistem, keadaan ini mencerminkan kebijakan yang tidak peka dan tidak dapat beradaptasi terhadap umpan balik. Dalam sudut pandang pengelolaan kolaboratif, terlihat bahwa asas kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas masih belum terwujud. Dari perspektif pariwisata berkelanjutan, penekanan yang berlebihan pada elemen ekonomi dan investasi jangka pendek mengorbankan elemen sosial dan lingkungan.

Berbeda dengan berbagai tujuan lain di Indonesia yang sukses menjaga kebersihan dan memberdayakan komunitas, Pantai Anyer masih ketinggalan dalam aspek inovasi pengelolaan bersama. Ini menunjukkan kebutuhan untuk merubah paradigma dari pembangunan yang fokus pada proyek fisik ke pengelolaan yang mengutamakan keberlanjutan dan keadilan sosial.

Analisis Ketidakseimbangan Kolaborasi Antaraktor

Jika ketiga peran tersebut dianalisis secara bersamaan, terlihat jelas ketidakseimbangan dalam pola kerjasama. Pemerintah menonjol dalam pembangunan infrastruktur dan promosi, sektor swasta unggul dalam investasi serta pengelolaan usaha, sementara masyarakat berada di posisi yang cukup lemah. Ketiadaan forum kolaboratif yang efisien, seperti pertemuan rutin yang menyatukan ketiga aktor untuk merencanakan dan menilai pengelolaan destinasi, menyebabkan kebijakan berjalan tidak menyeluruh.

Dalam sudut pandang teori sistem, situasi ini mencerminkan sistem kebijakan yang kurang responsif serta tidak mampu beradaptasi dengan umpan balik. Dalam sudut pandang tata kelola kolaboratif, terlihat bahwa prinsip kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas masih belum terealisasi. Dari perspektif pariwisata berkelanjutan, penekanan yang berlebihan pada aspek ekonomi dan investasi jangka pendek mengabaikan dimensi sosial dan lingkungan.

Jika dibandingkan dengan sejumlah tujuan lain di Indonesia yang mampu mempertahankan kebersihan dan memberdayakan komunitas, Pantai Anyer masih ketinggalan dalam aspek inovasi pengelolaan kolaboratif. Ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari pembangunan yang berfokus pada proyek fisik menuju pengelolaan yang mengedepankan keberlanjutan dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan infrastruktur wisata di Pantai Anyer menghadapi isu-isu mendasar yang berasal dari ketidakcocokan peran antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah sudah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dengan membangun jalan serta mempromosikan destinasi, namun pemeliharaan fasilitas umum dan pengelolaan kebersihan masih belum maksimal. Sektor swasta berkontribusi besar dalam investasi pada hotel dan resor, namun peran mereka dalam tanggung jawab sosial serta pelestarian lingkungan masih minim. Masyarakat lokal memiliki potensi dalam ekonomi dan sosial, tetapi partisipasinya terhambat oleh kendala modal, keterampilan, dan kurangnya dukungan kebijakan.

Secara teoritis, penerapan teori sistem, kolaborasi tata kelola, dan ide pariwisata berkelanjutan menjelaskan bahwa kegagalan utama disebabkan oleh tidak efektifnya mekanisme umpan balik dalam kebijakan, kurangnya kolaborasi setara, dan pengabaian keseimbangan antara aspek

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanpa peningkatan pada aspek ini, Pantai Anyer berpotensi menghadapi penurunan kualitas sebagai tujuan wisata.

Penelitian ini menyarankan, pertama, agar pemerintah beralih dari pembangunan fisik semata menjadi pengelolaan yang bersifat kolaboratif dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam forum perencanaan serta evaluasi. Kedua, sektor swasta harus didorong agar menjadikan program tanggung jawab sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan dari model bisnis, misalnya melalui pelatihan untuk UMKM, bantuan permodalan mikro, dan partisipasi dalam pengelolaan kebersihan. Ketiga, komunitas lokal harus mendapatkan lebih banyak ruang dan dukungan melalui penguatan kapasitas, akses dana, dan kebijakan yang mendukung usaha kecil. Keempat, aspek lingkungan perlu diutamakan melalui program pengelolaan limbah yang terintegrasi dan melibatkan masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pantai Anyer bisa berkembang menuju pariwisata yang sejati berkelanjutan, yang tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, I., & Julianto, E. (2023). Persepsi Wisatawan Terhadap Infrastruktur Wisata Pasca Revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(1), 194–206. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.57879>
- Kiswanto, A., & Susanto, D. R. (2020). Strategi Pengelolaan Pantai Baron Sebagai Pariwisata Berkelanjutan Dalam Menyongsong Abad Samudra India. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(3), 249–257. <https://doi.org/10.30647/jip.v25i3.1366>
- Kuhaja, T. (2014). Kajian Kelembagaan dalam Pengembangan Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(3), 278. <https://doi.org/10.14710/pwk.v10i3.7785>
- Riau, U. I., Riau, U. I., & Author, C. (2025). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Marina Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai *Fardina Ningsih 1 , Ahmad Fitra Yuza 2 I. 1–7.*
- Sari, L., & Sitorus, N. I. B. S. (2021). Kolaborasi Stakeholder Pariwisata dalam Pengelolaan Akomodasi di Desa Wisata Kabupaten Purwakarta di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(9), 1489–1496. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i9.403>
- Sayuti, R. H. (2023). *Community Readiness in Implementing Sustainable Tourism on Small Islands : Evidence from Lombok , Indonesia.*
- Shandy, V. M., Novrina, P. D., & Indonesia, N. A. (2022). *Ekraf: Jurnal Ekonomi Kreatif dan Inovatif Indonesia*. 1(2023), 45–53.
- Supriyanto, A., Kusbandrijo, B., & Widodo, J. (2024). Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan. *Cakrawala*, 18(1), 21–34. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.680>
- Syabina, Z., & Prawiro, J. (2024). Analisis Pengelolaan Kebersihan Dalam Meningkatkan Keputusan Wisatawan di Pantai Tanjung Pasir Tangerang. *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.47134/pjpp.v2i1.3368>
- Wibowo, M. S., Paninggiran, H. N. K., & Heptanti, U. (2023). Analisis Daya Tarik Wisata Dan Pengelolaan Destinasi Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(2), 608–616. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i2.59695>